

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data masalah yang dikaji, didapatkan simpulan penelitian dengan rincian sebagai berikut:

1. Secara umum kondisi ekonomi, sosial dan politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan HAM masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia (di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat) mengalami perkembangan yang baik. Pemerintah di kedua negara memaksimalkan pembangunan diberbagai bidang dalam mensejahterahkan masyarakat di perbatasannya masing-masing. Tidak terjadi kesenjangan yang signifikan antara masyarakat perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan masyarakat perbatasan Sarawak (Malaysia). Perkembangan kondisi khususnya Entikong mengalami kemajuan sejak dibukanya PPLB dan *Dry Port* menjadi akses jalur darat secara langsung ke Sarawak (Malaysia) berdampak pada kegiatan ekonomi, sosial dan politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan HAM di kedua negara tetangga tersebut. Keberadaan PPLB memberikan perubahan yang signifikan terhadap perkembangan perekonomian Kawasan Entikong, juga menjadikan produktivitas ekonomi kawasan maupun regional meningkat secara keseluruhan.
2. Secara umum masyarakat di perbatasan Indonesia (Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat) memahami arti penting nasionalisme dengan baik. Sikap nasionalisme masyarakat tersebut juga cukup tinggi meskipun terdapat kesamaan budaya dan etnis di kawasan perbatasan Entikong yang dapat dilihat dari antusiasme dalam partisipasi seremonial pada kegiatan-kegiatan kenegaraan dan adat budaya, penggunaan dan konsisten dalam penggunaan mata uang rupiah (Rp), dan sikap serta pandangan mereka dalam menggunakan produk lokal, ikut dalam partisipasi politik dalam pemilu baik di tingkat daerah maupun nasional, keikutsertaan masyarakat dalam

kegiatan program bina desa dan bela negara serta kesadaran akan ketaatan akan hukum.

3. Adapun yang menjadi faktor yang menghambat dalam internalisasi nilai nasionalisme di kawasan perbatasan pada masyarakat di daerah Kecamatan Entikong adalah kurangnya pelaksanaan sosialisasi dalam internalisasi nilai nasionalisme pada lingkungan keluarga dan masyarakat (adat), dimana pemahaman akan nasionalisme lebih banyak dilakukan di sekolah saja. Dalam upaya menghayati nasionalisme ini sangat perlu dilakukan terutama di dua desa yaitu Desa Pala Pasang dan Suruh Tembawang dimana kedua desa ini merupakan desa terluar dan terisolasi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

B. Implikasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan beberapa implikasi menyangkut internalisasi nilai nasionalisme di daerah kawasan perbatasan Indonesia – Malaysia. Implikasi dari hal tersebut dapat terlihat sebagai berikut :

1. Dalam hal ini Pemerintah Pusat sekarang ini memiliki sudut pandang kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan antar negara sebagai beranda depan sebuah negara telah mendorong para birokrat dan perumus kebijakan terintegrasi dengan mengembangkan suatu kajian tentang penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan perumusan sistem kesejahteraan dan keamanannya. Pemerintah melanjutkan pemerataan pembangunan khususnya di wilayah perbatasan Indonesia mengingat banyaknya wilayah RI yang telah dicaplok oleh negara asing. Saatnya menumbuhkan rasa nasionalisme demi terciptanya Indonesia yang adil dan makmur. Hal ini dapat dilihat dengan mengeluarkan dan menetapkan berbagai Peraturan dan Kebijakan yang sifatnya khusus untuk daerah kawasan perbatasan dengan negara lain baik di tingkat Provinsi, Kabupaten sampai kecamatan.
2. Kebijakan pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten yang wilayahnya berbatasan

Syafrial Nur, 2020

INTERNALISASI NILAI NASIONALISME DI DAERAH KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (STUDI KASUS PADA DAERAH PERBATASAN KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

Universitas Pendidikan Indonesia

repository.upi.edu

perpustakaan.upi.edu

langsung dengan negara tetangga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan di wilayah perbatasan khususnya Kecamatan Entikong di segala sektor terutama Pendidikan, Khususnya dalam pembelajaran IPS dimana dalam upaya agar internalisasi nilai nasionalisme dapat terlaksana dengan baik bagi para siswa siswa sekolah baik dari tingkat dasar sampai menengah. Semua itu di lakukan agar kelaknnya masyarakat kawasan perbatasan memiliki kualitas sumber daya manusia yang berkualitas yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Selain itu juga dilaksanakan program-program pemerintah daerah lain seperti dengan pemberian tunjangan daerah kepada para guru, polisi yang di tempatkan di daerah kawasan perbatasan. Pemberian bantuan dan pelatihan kepada pelaku unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

3. Melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut dan mendalam di kawasan perbatasan. Hal ini dikarenakan posisi daerah perbatasan yang sangatlah strategis bagi Indonesia, dapat juga dengan melibatkan instansi pemerintah sebagai upaya perumusan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan perbatasan. Sehingga nantinya kawasan perbatasan Entikong mengalami perkembangan kesejahteraannya dapat seimbang dengan Negara Malaysia.
4. Peningkatan nilai nasionalisme di daerah kawasan perbatasan Kecamatan Entikong dapat di lihat semakin pedulinya dengan keikutsertaan masyarakat dengan pelaksanaan agenda kegiatan nasional seperti Hari Kemerdekaan, Pemilu dan Pilkada. Dalam bidang ekonomi, masyarakat di Kecamatan Entikong semakin banyak beraktifitas di kawasan wilayah negara sendiri di karenakan telah bagus dan cukup baiknya jalan jalan antar desa dan yang menghubungkan sampai kecamatan, tersedia pasar yang juga lebih representatif serta semakin berkurangnya ketergantungan akan import barang konsumsi sehari hari di Entikong. Selain itu juga semakin berkurangnya penggunaan mata uang Ringgit Malaysia dalam proses transaksi perdagangan di wilayah perbatasan.
5. Berdasarkan pada RPMJ Berita Negara RI Nomor 44 Tahun 2011, Peraturan BNPP

Syafrial Nur, 2020

INTERNALISASI NILAI NASIONALISME DI DAERAH KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (STUDI KASUS PADA DAERAH PERBATASAN KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

Universitas Pendidikan Indonesia

repository.upi.edu

perpustakaan.upi.edu

Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025. Yang di dalamnya menetapkan bahwa Program pembangunan daerah perbatasan mencakup 4 aspek pokok, yaitu : membangun kesejahteraan rakyat dan ketahanan budaya masyarakat perbatasan; meningkatkan kapasitas daerah melalui penataan ruang, pembangunan sarana transportasi, pembangunan perumahan, dan pengembangan kapasitas lembaga pengelola pembangunan perbatasan; percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan; dan penegakan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik.

C. Rekomendasi

Secara umum, terdapat tiga saran yang peneliti memberikan berdasarkan kajian penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah Indonesia, baik itu pemerintah pusat maupun daerah, hendaklah bersinergi dan berkomitmen penuh dalam program pembangunan infrastruktur dan SDM di wilayah perbatasan. Hal tersebut akan sangat berdampak positif pada perkembangan ekonomi, social dan politik, pertahanan dan keamanan serta hukum dan HAM masyarakat perbatasan di Kecamatan Entikong. sebab hal ini dapat menunjang perekonomian yang akan berujung pada kemakmuran masyarakat. Dalam hal ini institusi pemerintah dan aparatur negaralah yang mampu menghubungkan komunitas kultural dengan komunitas politik (negara) agar pembangunan berjalan secara optimal di perbatasan khususnya di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah, lembaga adat serta masyarakat diharapkan dapat saling bersinergi untuk membuat program yang tepat guna terutama dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan sosial, Khususnya dalam pembelajaran IPS dimana dalam upaya agar internalisasi nilai nasionalisme dapat terlaksana dengan baik hal ini perlu dilakukan sebagai upaya untuk pengintegrasian masyarakat perbatasan di Kecamatan Entikong

Syafrial Nur, 2020

INTERNALISASI NILAI NASIONALISME DI DAERAH KAWASAN PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (STUDI KASUS PADA DAERAH PERBATASAN KECAMATAN ENTIKONG KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

Universitas Pendidikan Indonesia

repository.upi.edu

perpustakaan.upi.edu

dalam kerangka nasionalisme Indonesia. Kesamaan akan etnis dan budaya masyarakat di kedua negara tetangga tidak menjadi penghalang akan internalisasi nilai nasionalisasi. Akan tetapi pembangunan kesadaran nasionalisme ini tergantung pada sejauhmana negara mampu memfasilitasi hak-hak individu (*citizen rights*) dan hak-hak kolektif (*collective rights*) warga negara, sehingga pada gilirannya dan nilai nasionalisme menjadi bagian penting dari kesadaran kolektif akan identitas kebangsaan masyarakat yang berdampingan dengan identitas berbasis kultural.

3. Perlu adanya program yang berkesinambungan terkait internalisasi nilai nasionalisme di wilayah perbatasan dengan melalui sosialisasi pendekatan sosial kultural. Program tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah dan aparatur negara dalam bidang pendidikan akan tetapi juga melibatkan masyarakat khususnya keluarga serta lembaga adat. Hal ini perlu dilakukan karena selama ini pelaksanaan pemahaman akan nasionalisme lebih banyak di dapat dari sekolah saja. Upaya sosialisasi internalisasi nilai nasionalisme ini sangatlah perlu dilakukan terutama di dua desa yaitu Desa Pala Pasang dan Suruh Tembawang dimana kedua desa ini merupakan desa terluar dan terisolasi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

Saran-saran tersebut penting untuk kembangkan untuk mengetahui perkembangan sikap nasionalisme, internalisasi nilai nasionalisme, dan masalah atau faktor penghambat nasionalisme dapat diatasi. Namun demikian, kontribusi pendidikan hanya berpengaruh pada pengetahuan kognitif dan praktik-praktik kebangsaan secara formal. Dalam aspek yang paling mendasar, yaitu perasaan memiliki (*sense of belonging*) terhadap bangsa, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Padahal, perasaan memiliki terhadap bangsa merupakan salah satu makna penting nasionalisme. Identitas nasional tidak hanya dipresentasikan dalam imajinasi dan penggunaan simbol-simbol kebangsaan, seperti penggunaan bahasa, mata uang, pemilikan kartu tanda penduduk, tetapi yang sangat penting adalah identifikasi psikologis yang mengintegrasikan individu dan masyarakat dalam satu

identitas nasional.

Program program Pemerintah seperti Kawasan Khusus Daerah Perbatasan dengan segala programnya yang bersifat khusus dan responsif untuk membantu masyarakat perbatasan sangat di perlukan. Sehingga masyarakat kawasan perbatasan akan sangat terbantu dengan program yang tepat guna tersebut agar sehingga kesejahteraan masyarakat perbatasan Kalimantan Barat sebagai beranda terdepan NKRI dapat terwujud dan merata.